

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : JANUARI 2017
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU, KOPERASI USAHA KECIL DAN
 MENENGAH KAB. MAMUJU TENGAH.

Perizinan-Perizinan

No	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	Sektor Penanaman Modal	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Usaha. 5. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>). 6. Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah Sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal. 7. Layanan Informasi Penanaman Modal. 8. Legalisir Perijinan. 9. Daftar Ulang Perijinan. 10. Pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal.
2	Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1. Izin Angkutan Dalam Trayek 2. Izin Jasa Titipan. 3. Izin Warnet. 4. Izin Lembaga Penyiaran. 5. Izin TV Berlangganan. 6. Izin BTS/Tower. 7. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
3	Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan UKM	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Izin Usaha Industri. 6. Surat Izin Usaha Pinjam. 7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT). 8. Permohonan Persetujuan Prinsip Industri. 9. Rekomendasi Pertambangan. 10. Tanda Daftar Industri. 11. Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO). 12. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 13. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
4	Sektor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 2. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
5	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Apotek. 2. Izin Praktek Dokter. 3. Izin Praktek Bidan. 4. Izin Praktek Perawat. 5. Izin Toko Obat. 6. Surat Izin Kerja Apoteker. 7. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker 8. Surat Izin Kerja Perawat 9. Surat Izin Kerja Perawat Gigi 10. Surat Izin Kerja Radiografer 11. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen 12. Izin Praktek Pengobatan Traditional 13. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). 14. Surat Izin Klinik. 15. Izin Pendirian Optik 16. Izin Praktek Fisioterafis 17. Izin Pendirian Balai Pengobatan 18. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin 19. Izin Analisis Kesehatan 20. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan D. 21. Surat Izin Kerja Bidan. 22. Izin Penyaluran Alat Kesehatan (PAK). 23. Izin Usaha Micro Obat Traditional (UMOT). 24. Penerbitan izin Produksi Makanan dan Minuman Pada Industri Rumah

6	Sektor Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB). 2. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM/UKS/ yang bergerak dibidang Kesejahteraan Sosial. 3. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
7	Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pemasukan/pengeluaran ternak bibit/potong 2. Izin Pemasukan/pengeluaran ternak kesayangan. 3. Izin pemasukan/pengeluaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH). 4. Izin Obat Hewan. 5. Sertifikasi Produk Prima 3 dan Prima 2. 6. Izin Usaha Peternakan 7. Izin Usaha Pematangan Hewan/Ternak. 8. Surat Keterangan Pengeluaran Ternak Potong Antara Daerah Wilayah SULBAR. 9. Rekomendasi Usaha Pengembangan dan Penggemukan Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah. 10. Surat Keterangan Ternak Sehat 11. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak (visum) dan Berita Acara Kematian Ternak. 12. Surat Keterangan Bebas Penyakit Reproduksi. 13. Izin Usaha Perkebunan (IUP). 14. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B). 15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). 16. Perubahan Kapasitas Perubahan Hasil. 17. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan (TRUP). 18. Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan 19. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya

		20. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
8	Sektor Tata Ruang dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Pemasangan Reklame. 3. Perubahan Fungsi Izin bangunan. 4. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan. 6. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan. 7. Rekomendasi Persampahan. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
9	Sektor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang 2. Izin Lokasi Perumahan 3. Izin Lokasi Perkebunan 4. Izin Lokasi Reklamasi 5. Izin Lokasi Pelabuhan 6. Izin Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 7. Rekomendasi Perumahan. 8. Usulan dan Fasilitas Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal dibidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. 9. Usulan dan Fasilitas Pembebasan Atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan. 10. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 11. Angka Pengenal Importir Umum (API-U). 12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01).
10	Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan 2. Rekomendasi Kegiatan 3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum

		20. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).
8	Sektor Tata Ruang dan Kebersihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Pemasangan Reklame. 3. Perubahan Fungsi Izin bangunan. 4. Pemecahan Izin Mendirikan Bangunan. 5. Balik Nama Izin Mendirikan Bangunan. 6. Duplikat Izin Mendirikan Bangunan. 7. Rekomendasi Persampahan. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi. 9. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
9	Sektor Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang 2. Izin Lokasi Perumahan 3. Izin Lokasi Perkebunan 4. Izin Lokasi Reklamasi 5. Izin Lokasi Pelabuhan 6. Izin Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha. 7. Rekomendasi Perumahan. 8. Usulan dan Fasilitas Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal dibidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu. 9. Usulan dan Fasilitas Pembebasan Atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan. 10. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). 11. Angka Pengenal Importir Umum (API-U). 12. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 13. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01).
10	Sektor Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Hotel, Penginapan dan Rumah Makan 2. Rekomendasi Kegiatan 3. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum

11	Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Izin Pembuangan Limbah kemedialingkungan.2. Izin Pemanfaatan Limbah Cair Industri.3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
----	-------------------------	---

BUPATI MAMBUKU TENGGAH

H. ARAS TAMMAUNI